

LAPORAN
PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2018

Latar Belakang

Kemensetneg adalah lembaga kepresidenan yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas dan fungsi yang diamanatkan tersebut menjadikan Kemensetneg memiliki posisi strategis di masyarakat sebagai arus utama dalam mendapatkan informasi berkaitan dengan kepresidenan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Asisten Deputy Hubungan Masyarakat merupakan satuan kerja yang berada di bawah Deputy

Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.

Asisten Deputy Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan pelayanan informasi publik, monitoring dan analisis media terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara, serta desiminasi informasi kehumasan dan pemberitaan Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputy Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pengelolaan, pelayanan dan dokumentasi informasi publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Sekretariat Negara;
- b. pengoordinasian hubungan komunikasi dan kerjasama terkait kehumasan dengan satuan organisasi di lingkungan kementerian Sekretariat Negara/ Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya serta masyarakat dalam rangka implementasi program komunikasi Kementerian Sekretariat Negara;
- c. penyelenggaraan monitoring dan analisis media terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara;
- d. penyelenggaraan peliputan dan dokumentasi mengenai kegiatan Kementerian Sekretariat Negara;
- e. penyelenggaraan diseminasi informasi kehumasan Kementerian Sekretariat Negara melalui media publikasi yang berbasis teknologi informasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.

Struktur Organisasi

Asisten Deputi Hubungan Masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, yaitu terdiri atas:

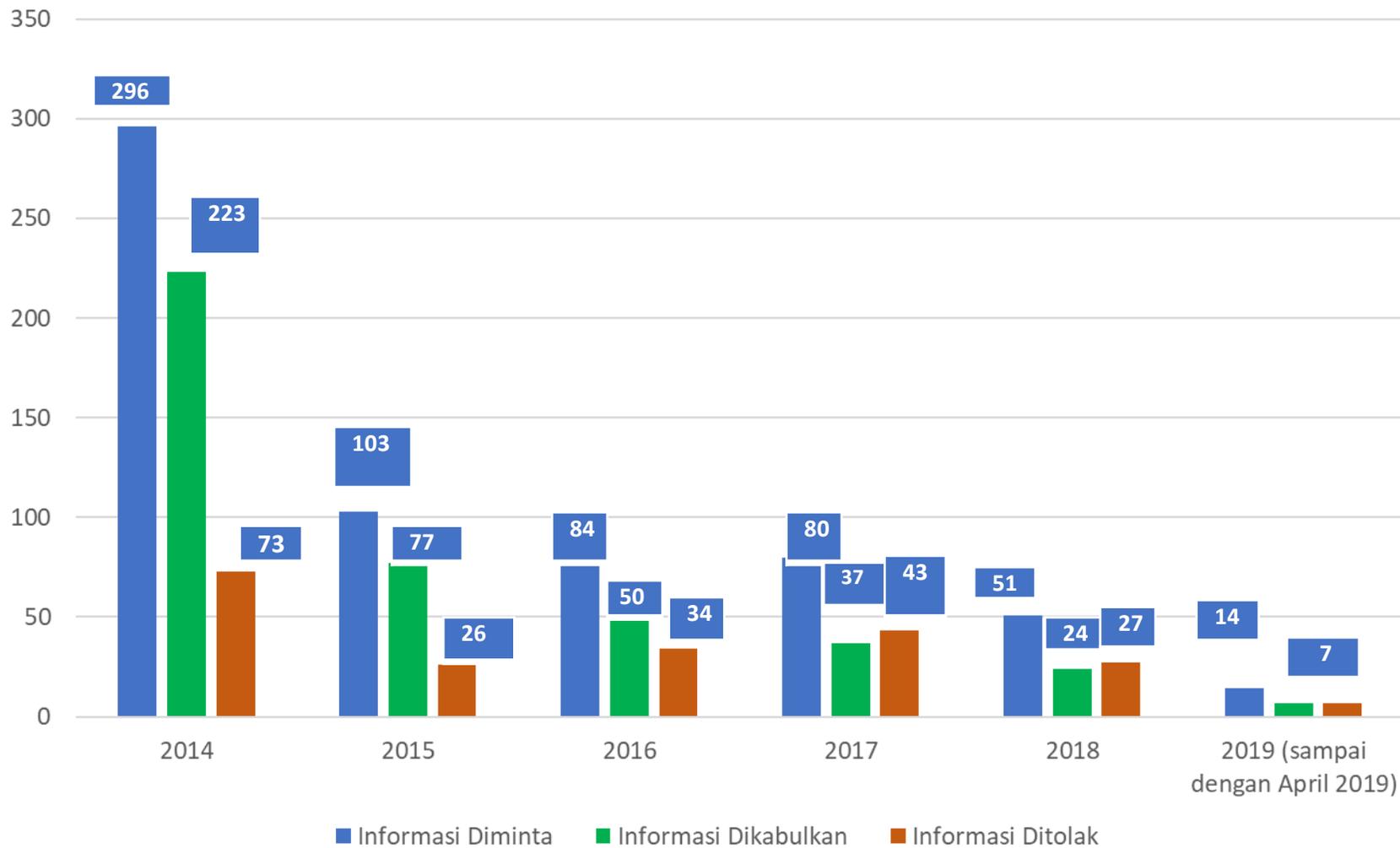
1. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pelayanan Informasi Publik.
 - 2) Subbidang Komunikasi Publik.
2. Bidang Monitoring dan Analisis Media, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Monitoring dan Analisis Media Online; dan
 - 2) Subbidang Monitoring dan Analisis Media Cetak dan Elektronik.
3. Bidang Peliputan dan Dokumentasi, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Peliputan dan Dokumentasi Visual; dan
 - 2) Subbidang Peliputan dan Dokumentasi Audio-Visual
4. Bidang Diseminasi Informasi, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pengelolaan Website dan Media Sosial, dan
 - 2) Subbidang Pengelolaan Media Publikasi Kehumasan.

Ruang Lingkup Kegiatan Humas Kementerian Sekretariat Negara dalam Hal Pengelolaan Informasi.

Dengan adanya tuntutan peran humas Pemerintah untuk selalu bertindak proaktif dalam melakukan tugasnya, ruang lingkup kegiatan humas Kementerian Sekretariat Negara terkait Pengelolaan Informasi Publik, terdiri atas

- a. Pelayanan informasi publik dengan memproses dan menindaklanjuti permohonan informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara serta menindaklanjuti pengajuan keberatan atas penanganan informasi publik yang diminta masyarakat; menyediakan corner Pelayanan Informasi Publik dan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang Kemensetneg baik dengan datang langsung maupun melalui email, telpon, dan faksimili.
- b. Penerimaan Kunjungan Delegasi Masyarakat yang melakukan studi banding dan pembelajaran tentang tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara dalam memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kesekretariatan negara.
- c. Penerimaan penyampaian aspirasi masyarakat secara langsung/unjuk rasa yang ditujukan kepada Presiden, melalui memantau pelaksanaan unjuk rasa di depan Istana Merdeka, memfasilitasi solusi penanganan unjuk rasa melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, menerima perwakilan unjuk rasa, menerima aspirasi, dan membuat laporan tertulis penanganan unjuk rasa dimaksud.
- d. Pelaksanaan koordinasi pelayanan Informasi dan kehumasan Kementerian Sekretariat Negara melalui penyelenggaraan FGD Penguatan Kapasitas Kehumasan, menghadiri undangan seminar/FGD dari instansi lain, menghadiri pertemuan Bakohumas, dan koordinasi dengan instansi lainnya.

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENSETNEG



Rekapitulasi Daftar Informasi Publik Kemensetneg



NO	Nama PPID Pelaksana	Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala	Informasi yang Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi yang Wajib Diumumkan Serta Merta	Infromasi yang Dikecualikan
1	PPID Pelaksana Setpres	-	-	-	-
2	PPID Pelaksana Setwapres	13	29	-	46
3	PPID Pelaksana Setmilpres	30	-	-	6
4	PPID Pelaksana Sekretariat Kementerian dan Kedeputan	-	142	-	258
5	PPD Pelaksna Wantimpres	5	9	-	13
6	PPID Pelaksana KSP	27	11	-	9
7	PPID Pelaksana PPK GBK	18	-	-	-
8	PPID Pelaksana PPK Kemayoran	32	54	10	10

**RINGKASAN AKSES INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PERIODE TAHUN 2018**

No.	Periode Tahun 2018	Jumlah Pemohon Informasi (lembaga/ individu)	Rata-Rata Waktu Penanganan Permohonan Informasi	Jumlah Informasi yang Diminta	Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan	Jumlah Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik
1	Januari	3	2 hari	4	2	2	Informasi tidak dibawah Penguasaan PPID Kementerian Sekretariat Negara, dan telah diarahkan ke PPID Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan PPID Kemenkumham
2	Februari	4	1 hari	5	-	5	Informasi tidak dibawah Penguasaan PPID Kementerian Sekretariat Negara, dan telah diarahkan ke PPID Kementerian Dalam Negeri
3	Maret	9	9 hari	13	4	9	Informasi tidak dibawah Penguasaan PPID Kementerian Sekretariat Negara, dan telah diarahkan ke PPID Kementerian Agama
4	April	3	2 hari	3	-	3	Informasi tidak dibawah Penguasaan PPID Kementerian Sekretariat Negara, dan telah diarahkan ke PPID Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5	Mei	3	2 hari	8	7	1	Informasi tidak dibawah Penguasaan PPID Kementerian Sekretariat Negara, dan telah diarahkan ke PPID Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
6	Juni	2	2 hari	2	2	-	-
7	Juli	1	hari	1	1	-	-
8	Agustus	4	4 hari	4	1	3	Informasi tidak dibawah Penguasaan PPID Kementerian Sekretariat Negara, dan telah diarahkan ke PPID Kementerian Agama atau menghubungi BPKH
9	September	-	hari				-
10	Oktober	2	2 hari	2	1	1	Informasi dikecualikan, hal ini menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 304 huruf d yang intinya bahwa dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas Negara, yang dibiayai APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
11	November	3	4 hari	4	2	2	Informasi tidak dibawah penguasaan PPID Kemensetneg diarahkan ke PPID Menkumham
12	Desember	5	8 hari	5	4	1	Informasi tidak dibawah Penguasaan PPID Kemensetneg diarahkan ke PPID Kemen PPPA atau Ke Biro Hukum Kemen PPPA
TOTAL		39	36 hari	51	24	27	

Asisten Deputi Hubungan Masyarakat
Kementerian Sekretariat Negara,



Eddy Cahyono Sugiarto, S.Sos., M.Si.

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
BULAN JANUARI 2018**

No. (Pl...)	Tanggal Permohonan Informasi	Tanggal Pemberian Informasi	Jumlah Penanganan hari kerja	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Biaya & Cara Pembayaran		Ket.
										Di Bawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Biaya	Cara	
										Ya	Tidak										
1 01/1/2018	11 Januari 2018	11 Januari 2018	10	Lis Prifina				1 SK Tim Medis/Tenaga Kesehatan Kepresidenan	Mengetahui nama-nama tenaga kesehatan dalam SK Tim	-	X	X	-	-	-	X	1 SK Tim Dokter Kepresidenan tidak disampaikan	Yang bersangkutan telah di hubungi (telpon) untuk melengkapi data dan mengirimkan permohonan ulang dengan menuliskan tujuan penggunaan informasi secara rinci, namun belum di tanggapan dari YBS	-	-	-
2 02/1/2018	15 Januari 2018	26 Januari 2018	10	Gabriella Anastasia				1 Risetlah Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan	Melengkapi data skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan	-	X	X	-	-	X	X	1 Risetlah Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak diberikan, dan telah dijawab melalui surat nomor B-10/Kemensektneq/Humas/H.M.01.00/01/2018, tanggal 26 Januari 2018, dikirim melalui email pada tanggal 26 Januari 2018	Informasi tidak dibawah Penguasaan PPID Kementerian Sekretariat Negara, dan telah diarahkan ke PPID Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan PPID Kemenkumham	x	-	-
3 03/1/2018	15 Januari 2018	15 Januari 2018	1	Sri Sudarjo, S.Pd, S.H				1 Undang-undang nomor 7 tahun 2017	Melakukan pengaduan gugatan ke DKPP melawan KPU dan Bawastu NTB	X	-	-	X	X	X	X	1 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 telah disampaikan ke YBS pada tanggal 15 Januari 2018	-	-	-	-
								2 undang-undang nomor 10 tahun 2016									2 undang-undang nomor 10 tahun 2016 telah disampaikan ke YBS pada tanggal 15v Januari 2018				

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
BULAN FEBRUARI 2018**

No. (Pl...)	Tanggal Permohonan Informasi	Tanggal Pemberian Informasi	Jumlah Penanganan hari kerja	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Biaya & Cara Pembayaran		Ket.
										Di Bawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Biaya	Cara	
										Ya	Tidak										
1 4/II/2018	5 Februari 2018	19 Februari 2018	10	Tri Aktariyani				1 Dokumen DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 2 Dokumen DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2022 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).	Penulisan Tesis	-	X	X	-	-	-	X	1 Dokumen DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Dokumen DIM Undang-Undang Nomor 24 tahun 2022 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak diberikan dan telah dijawab melalui surat Nomor B-17/kemenseg/Humas/H.M.01.00/02/2018, dikirim melalui email tanggal 19 Februari 2018	Informasi tidak dibawah Penguasaan PPID Kementerian Sekretariat Negara, dan telah diarahkan ke PPID Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	-	-	-
2 5/II/2018	7 Februari 2018	21 Februari 2018	10	Firda Zahnia			1 Risalah Sidang dan Naskah Akademik PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Untuk Mengerjakan Tesis	-	X	X	-	-	-	X	1 Risalah Sidang dan Naskah Akademik PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak disampaikan, dan telah dijawab melalui surat No B-16 Kemenseg/D-2/Humas/HM.01.00/02/2018, dikirim melalui email pada tanggal 21 Februari 2018	Informasi tidak dibawah Penguasaan PPID Kementerian Sekretariat Negara, dan telah diarahkan ke PPID Kementerian Dalam Negeri	-	-	-	
3 6/II/2018	15 Februari 2018	27 Februari 2018	8	Tanazza Zalsabella Firsty			1 Risalah Pembahasan dan Naskah Akademik PP Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia	Untuk Penelitian Tesis	-	X	X	-	-	-	X	1 Risalah Pembahasan dan Naskah Akademik PP Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, tidak diberikan, dan telah dijawab melalui surat Nomor B-22 Kemenseg/Humas/HM.01.00/02/2018, dikirim melalui email pada tanggal 27 Februari 2018	Informasi tidak dibawah Penguasaan PPID Kementerian Sekretariat Negara, dan telah diarahkan ke PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional	-	-	-	
4 7/II/2018	26 Februari 2018	5 Maret 2018	6	Eka Rachmawati			1 Naskah Akademik RUU Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2014	Untuk Penelitian Tesis	-	X	X	-	-	-	X	1 Naskah Akademik RUU Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2014, tidak diberikan, dan telah dijawab melalui surat Nomor B-23 Kemenseg/Humas/HM.01.00/03/2018, dikirim melalui email pada tanggal Maret 2018	Informasi tidak dibawah Penguasaan PPID Kementerian Sekretariat Negara, Permohonan telah diteruskan oleh PPID Kemenseg kepada PPID DPR RI untuk menindak lanjut permohonan dimaksud (surat ke PPID DPR RI juga ditembuskan kepada pemohon informasi)	-	-	-	

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
BULAN FEBRUARI 2018**

No. (Pl...)	Tanggal Permohonan Informasi	Tanggal Pemberian Informasi	Jumlah Penanganan hari kerja	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Biaya & Cara Pembayaran		Ket.	
										Di Bawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Biaya		Cara
										Ya	Tidak										

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
BULAN MARET 2018**

No. (Pk...)	Tanggal Permohonan Informasi	Tanggal Pemberian Informasi	Jumlah Penanganan hari kerja	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Biaya & Cara Pembayaran		Ket.		
										Di Bawah Pengawasan		Belum Didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Biaya		Cara	
										Ya	Tidak											
1 8/III/2018	1 Maret 2018	12 Maret 2018	8	Azis Nur Fadillah				1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia	Penelitian (Skripsi)	X	-	-	X	X	X	X	1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia telah diberikan kepada YBS melalui e-mail, pada tanggal 12 Maret 2018 dengan nomor surat B-29/Kemensektneq/Humas/H.M.01.00/03/2018	-	-	-	-	
2 9/III/2018	2 Maret 2018	15 Maret 2018	10	Ratna Ayu Puspitasari				1 Naskah Akademik Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan	Sebagai bahan kajian tesis pemohon yang berjudul, "Implikasi Yuridis terhadap notaris yang Menolak Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan"	-	X	X	-	-	X	X	1 Naskah Akademik Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan tidak diberikan, dan telah dijawab melalui surat Nomor B-33/Kemensektneq/Humas/H.M.01.00/03/2018, dikirim melalui e-mail pada tanggal 15 Maret 2018	Informasi tidak dibawah Penguasaan PPID Kementerian Sekretariat Negara, dan telah diarahkan ke PPID Kementerian Hukum dan HAM	-	-	-	-
3 10/III/2018	5 Maret 2018	15 Maret 2018	9	Dian Kurnia Hayati				1 Risaalah Sidang Kompilasi Hukum Islam	Bahan penulisan skripsi yang berjudul, "Pasang Surut Politik dan Hukum Islam: Perubahan Kewenangan Peradilan Agama Tahun 1989-2006"	-	X	X	-	-	X	X	1 Risaalah Sidang Kompilasi Hukum Islam tidak diberikan, dan telah dijawab melalui surat Nomor B-35/Kemensektneq/Humas/H.M.01.00/03/2018, dikirim melalui e-mail tanggal 15 Maret 2018	Informasi tidak dibawah Penguasaan PPID Kementerian Sekretariat Negara, dan telah diarahkan ke PPID Kementerian Agama	-	-	-	-
4 11/III/2018	14 Maret 2018	20 Maret 2018	5	Rhinata Sharifina				1 PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Komunikasi	Riset Perkuliahan	-	X	X	-	-	X	X	1 PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Komunikasi tidak disampaikan, dan telah dijawab melalui surat No. B-37/Kemensektneq/Humas/H.M.01.00/03/2018, dikirim melalui e-mail tanggal 20 Maret 2018	Informasi tidak dibawah Penguasaan PPID Kementerian Sekretariat Negara, dan telah diarahkan ke PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
								2 PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit		-	X	X	-	-	X	X	2 PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit tidak diberikan, dan telah dijawab melalui surat Nomor B-37/Kemensektneq/Humas/H.M.01.00/03/2018, dikirim melalui e-mail tanggal 20 Maret 2018	Informasi tidak dibawah Penguasaan PPID Kementerian Sekretariat Negara, dan telah diarahkan ke PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
5 12/III/2018	13 Maret 2018	26 Maret 2018	10	Michael Thomson				1 Salinan PP No. 8 Tahun 2018 tentang penetapan harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri	Riset dan Penelitian	X	-	-	X	X	X	X	1 Salinan PP No. 8 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Batu Bara untuk Kebutuhan Dalam Negeri telah diberikan kepada YBS melalui e-mail pada tanggal 26 maret 2018 dengan nomor surat B-41/Kemensektneq/Humas/H.M.01.00/03/2018	-	-	-	-	-

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
BULAN MARET 2018**

No. (P/...)	Tanggal Permohonan Informasi	Tanggal Pemberian Informasi	Jumlah Penanganan hari kerja	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Biaya & Cara Pembayaran		Ket.	
										Di Bawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Biaya		Cara
										Ya	Tidak										

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
BULAN APRIL 2018**

No. (Pk-)	Tanggal Permohonan Informasi	Tanggal Pemberian Informasi	Jumlah Penanganan hari kerja	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikusai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Biaya & Cara Pembayaran		Ket.	
										Di Bawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Biaya		Cara
										Ya	Tidak										
1 17/IV/2018 Kebalik sama Si Widayanti	2 April 2018	12 April 2018	9	Nabella Aulia				1 Naskah Akademik Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Bahan Lomba Moot Court Competition dan Latihan Sidang Semu di Moot Court Community UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	-	X	X	-	-	X	X	1 Naskah Akademik Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diberikan, dan telah dijawab melalui surat Nomor B55/Kemensehneq/Humas/HM.00.00/04/2018	Informasi tidak dibawah Penguasaan PPIID Kementerian Sekretariat Negara, dan telah diarahkan ke PPIID Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	-	-	-
2 18/IV/2018	6 April 2018	13 April 2018	6	Ariawan Suryopobo			1 Peraturan Pemerintah tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian	Untuk mematuhi PP tersebut, Untuk secepatnya menyesuaikan PP tersebut kepada perusahaan; serta sebagai sarana informasi bagi shareholders yang 80% nya adalah orang asing		-	X	X	-	-	X	X	1 Peraturan Pemerintah tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian tidak disempurnakan dan telah dijawab melalui surat No. B55/Kemensehneq/Humas/HM.00.00/04/2018	Peraturan Pemerintah dimaksud masih dalam proses mendapatkan persetujuan Presiden Republik Indonesia	-	-	-
3 19/IV/2018	10 April 2018	19 April 2018	8	Fadila Dwi Lailawati			1 Ruzalah Sidang Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	Data pendukung tugas akhirthesis		-	X	X	-	-	X	X	1 Ruzalah sidang Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak tidak diberikan dan telah dijawab melalui surat Nomor B55/Kemensehneq/Humas/HM.00.00/04/2018	Informasi tidak dibawah penguasaan PPIID kemensehneq dan telah diarahkan ke PPIID Kementerian Sosial	-	-	-

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
BULAN MEI 2018**

No. (Pl-...)	Tanggal Permohonan Informasi	Tanggal Pemberian Informasi	Jumlah Penanganan hari kerja	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Biaya & Cara Pembayaran		Ket.		
										Di Bawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Biaya		Cara	
										Ya	Tidak											
1 20/V/2018	7 Mei 2018	17 Mei 2018	8	Donaldy Dani Permana				1 Pidato Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono terkait kenaikan harga atau pengurangan subsidi BBM	Tugas kuliah	X	-	-	X	X	X	X	1 Pidato Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono terkait kenaikan harga atau pengurangan subsidi BBM telah disampaikan ke YBS ,melalui email pada tanggal 17 Mei 2018	-	-	-	-	
2 21/V/2018	21 Mei 2018	28 Mei 2018	6	Misra Febriny				1 naskah akademis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Untuk mengerjakan/penulisan tugas akhir (thesis)	-	X	X	-	-	X	X	1 Naskah Akademis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak disampaikan dan telah dijawab melalui surat No. B99/Kemensekneg/Humas/Jan.00.00/05/2018. diambil	Informasi tidak dibawah Penguasaan PPID Kementerian Sekretariat Negara, dan telah diarahkan ke PPID Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	-	-	-	-
3 22/V/2018	21 Mei 2018	5 Juni 2018	10	elizabeth amadea krishnataia				1 buku dalam bentuk elektronik 2 majalah humas 3 bulletin 4 siaran pers Januari 2018 sampai dengan Mei 2018 5 video 6 poster	tujuan untuk mengumpulkan tugas mata kuliah manajemen komunikasi pemerintahan	X	-	-	X	X	X	X	1 buku dalam bentuk elektronik, majalah humas, Bulletin, siaran pers Januari 2018 sampai dengan Mei 2018, Video, Poster, surat jawaban beserta laman link telah disampaikan ke YBS ,melalui email pada tanggal 5 dan 8 Juni 2018	-	-	-	-	

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
BULAN AGUSTUS 2018**

No. (PI-...)	Tanggal Permohonan Informasi	Tanggal Pemberian Informasi	Jumlah Penanganan hari kerja	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Biaya & Cara Pembayaran		Ket.	
										Di Bawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Biaya		Cara
										Ya	Tidak										
1 26/VIII/2018	4 Agustus 2018	15 Agustus 2018	8	Betari Monika Fidah Wajasongko				Risalah Perppu Nomor 1 Tahun 2016 (Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak) menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 (Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak).	Keperluan Kompetensi	-	X	X	-	-	X	X	Risalah Perppu Nomor 1 Tahun 2016 (Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 (Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Tidak diberikan dan telah dijawab melalui surat Nomor B-3344/Kemensehreg/D-2HM.00.00/08/2016, dikirim melalui email pada tanggal 15 Agustus 2018	Informasi tidak dibawah Penguasaan PPIID Kementerian Sekretariat Negara, dan telah diarahkan ke PPIID Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	-	-	-
2 27/VIII/2018	7 Agustus 2018	21 Agustus 2018	10	Bukti Darbi Sitompul				Permohonan informasi mengenai pelayanan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Presiden RI melalui surat nomor 197/MIF/BDSP/2018, Tanggal 5 Juni 2018	mendapatkan informasi terkait permohonan pengaduan yang diajukan	X	-	-	X	X	X	-	Permohonan informasi mengenai pelayanan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Presiden RI melalui surat nomor 197/MIF/BDSP/2018, Tanggal 5 Juni 2018, telah dijawab melalui surat nomor B-3431/Kemensehreg/D-2HM.00.00/08/2018, tanggal 21 Agustus 2018	-	-	-	-
3 28/VIII/2018	13 Agustus 2018	5-Sep-18	10	Musholih				Salinan/turunan/copy Keputusan Presiden tentang Pengangkatan KEPALA BADAN PELAKSANA Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atas Nama Angglo Abimanyu	Pengawasan, transparansi dan implementasi good corporate governance (GCG) terhadap BPKH sebagai Badan Hukum Publik	-	X	X	-	-	X	X	Salinan/turunan/copy Keputusan Presiden tentang Pengangkatan KEPALA BADAN PELAKSANA Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atas Nama Angglo Abimanyu, tidak disampaikan dan telah dijawab melalui surat No. B-3676/Kemensehreg/D-2HM.00.00/08/2018	Informasi tidak dibawah Penguasaan PPIID Kementerian Sekretariat Negara, dan telah diarahkan ke PPIID Kementerian Agama atau menghubungi BPKH	-	-	-
4 29/VIII/2018	31 Agustus 2018	18-Sep-18	12	Anindita Nadya Andanari				Berita Negara RI No. 73/11-09-1992, Tambahan Berita Negara RI No. 7620-09-1996	Dokumentasi Arsip yang hilang untuk proses peradilan PT. BNI (Persero), Tbk	-	X	X	X	X	X	X	Berita Negara RI Nomor 73/11-09-1992, Tambahan Berita Negara RI No. 7620-09-1996, tidak diberikan dan telah dijawab melalui surat Nomor B-3847/Kemensehreg/D-2HM.00.00/09/2018, tanggal 18 September 2018 dan telah dikirim melalui email pada tanggal 18 September 2018	Informasi tidak dibawah Penguasaan PPIID Kementerian Sekretariat Negara.	-	-	-

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
BULAN OKTOBER 2018**

No. (PI-...)	Tanggal Permohonan Informasi	Tanggal Pemberian Informasi	Jumlah Penanganan hari kerja	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Biaya & Cara Pembayaran		Ket.		
										Di Bawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Biaya		Cara	
										Ya	Tidak											
1 30/X/2018	3 Oktober 2018	11 Oktober 2018	7	Vicky Ferdian Saputra				1 Saya membutuhkan Lampiran III, pada Peraturan KEMENSETNEG No.26 Tahun 2015 tentang standar pelayanan pengelolaan museum dan pemeliharaan benda seni di Istana Kepresidenan Yogyakarta	sebagai sumber data Tugas Akhir S1	X	-	-	X	-	X	X	1 Lampiran III, pada Peraturan KEMENSETNEG No.26 Tahun 2015 tentang standar pelayanan pengelolaan museum dan pemeliharaan benda seni di Istana, telah di unduh di website setneg, ybs telah di infokan agar mengunduh di website, jcs di email tanggal 11 Oktober 2018	-	-	-	-	
2 31/X/2018	5 Oktober 2018	18 Oktober 2018	10	Ibal Zulfianto				1 Dokumentasi Foto Presiden Joko Widodo Bersepeda	Untuk keperluan foto booth saat kampanye	X	-	-	X	-	X	X	1 Dokumentasi Foto Presiden Joko Widodo Bersepeda dengan resolusi tinggi, tidak diberikan dan telah dijawab melalui surat No. B-4411/Kemenseatreg-D-24MM.00.00/10/2018, tanggal 17 Oktober 2018 dan telah dikirim melalui email pada tanggal 18 Oktober 2018	Tujuan penggunaan Fob untuk keperluan kampanye mengingat produksi foto Presiden RI bersepeda bersumber dari dana APBN, hal ini menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 304 huruf d yang intinya bahwa dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas Negara, yang dibiayai APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah	-	-	-	-

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
BULAN NOVEMBER 2018**

No. (Pl-...)	Tanggal Permohonan Informasi	Tanggal Pemberian Informasi	Jumlah Penanganan hari kerja	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Biaya & Cara Pembayaran		Ket.	
										Di Bawah Pengawasan		Belum Didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Biaya		Cara
										Ya	Tidak										
1 32/XI/2018	6-Nov-18	19-Nov-18	10	I Putu Mahendra Ramawita Russell Palmer				1 Informasi Jadwal Sumpah Kewarganegaraan	Pribadi	-	X	X	-	-	X	-	1 Informasi Jadwal Sumpah Kewarganegaraan tidak diberikan dan telah dijawab melalui surat No. 154/Kemensehreg/D-2/HM.00.00/11/2018, tanggal 16 November 2018, dikirim melalui email pada tanggal 19 November 2018	Informasi tidak dibawah pengawasan PPIID Kemensehreg diarahkan ke PPIID Menkumham	-	-	-
2 33/XI/2018	1-Nov-18	24 November 2018 <i>intinya lewat dari 17 hari kerja</i>	17	Bukt Darbis Sitompul				1 Permohonan informasi mengenai pelayanan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada PPIID Kemensehreg melalui surat nomor 302/PIB/DSP/2018, Tanggal 17 Oktober 2018	mendapatkan informasi terkait permohonan pengaduan yang diajukan	X	-	-	X	X	X	-	1 Permohonan Informasi telah dijawab melalui surat dan dikirim email kepada YBS	-	-	-	
3 34/XI/2018	23-Nov-18	14-Dec-18	17	Sofyana Ali Bindiari				1 Susunan Kabinet Lengkap dari Pertama Indonesia berdiri atau dari Era Presiden Soekarno sampai dengan Era Presiden	Akan digunakan sebagai bahan riset untuk membuat film pendek yang bertemakan Nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika.	X	-	X	X	X	-	X	1 Telah disampaikan ke YBS dikirim melalui email	-	-	-	
								2 Data audio Pidato Kepresidenan dari masa Presiden Soeharto sampai dengan Presiden Jokowi yang berkaitan dengan Nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika	Akan digunakan sebagai bahan riset untuk membuat film pendek yang bertemakan Nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika. Menyatakan gagasan para Presiden tersebut dalam membangun ke Indonesiaan yang beragam namun damai.	-	X	-	-	-	-	X	2 Data tidak diberikan	Tidak dibawah Pengawasan PPIID Kemensehreg, dan telah diarahkan ke ANRI diberlakukan melalui email	-	-	-

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
BULAN DESEMBER 2018**

No. (Prl...)	Tanggal Permohonan Informasi	Tanggal Pemberian Informasi	Jumlah Penanganan hari kerja	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Biaya & Cara Pembayaran		Ket.		
										Di Bawah Pengusahaan		Belum Didokumentasikan	Softcopy	Hardcopy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Biaya		Cara	
										Ya	Tidak											
1 35/XII/2018	9-Dec-18	3-Jan-19	17	Mashindra Prisma Saputra				Foto/ dokumentasi bersama Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat penyerahan penghargaan HUT PGRI dan Hari Guru untuk Pemenang Pertama Kreativitas Pembelajaran pada tanggal 1 Desember 2018 di Stadion Pakansari, Bogor.	Untuk keperluan pribadi, kenang-kenangan.	X	-	-	X	X	X	X						
2 36/XII/2018	16-Dec-18	10-Jan-19	17	Friso Pallingan				foto saat saya bersalaman dengan Bapak Presiden Joko Widodo yang saya hormati, pada saat beliau selesai menyampaikan pidato dan membuka Kongres IAI yang dilaksanakan tanggal 11 Desember 2018 pk. 11.00. Saya berdiri seadrenan dengan Ibu Sri Mulyani, Bpk. M. Natsir, Bpk. Jonan dan Bpk. Yasrona, dan berkesempatan menyalami Bapak Presiden paling terakhir saat beliau akan meninggalkan ruangan. Jika juga ada, saya juga sangat berterima kasih jika boleh diberikan foto saat berjejer dengan para Menteri yang turut hadir. Saya juga melampirkan referensi foto posisi saya berdiri.	sebagai dokumentasi pribadi, karena saya sangat mengagumi Bapak Presiden, Bapak Jonan dan Ibu Sri Mulyani.	X	-	-	X	X	X	X						
3	17-Dec-18	10-Jan-19	17	Ardhy Rokhmat Dewantara				Sambutan / Pidato Presiden RI dalam Rangka Peringatan Hari Bela Negara	Untuk menjadi sambutan yang akan dibacakan oleh Direksi PT Petrokimia Gresik pada upacara tersebut	X	-	-	X	X	X	X						
4 38/XII/2018	18-Dec-18	11-Jan-19	17	Godfried TB Sibunan				Keppres No. 14 tahun 1976 dan Keppres No. 33 tahun 1976	alat bukti persidangan	X	-	-	X	X	-	X						
5 39/XII/2018	20-Dec-18	2-Jan-19	7	Andreas P Siambaton				Risalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Kepentingan skripsi	-	X	X	-	-	X	X		Tidak dibawah Pengawasan PPID Kemensehreg, dan telah diarahkan ke PPID Kemen PPPA atau Ke Biro Hukum Kemen PPPA				